



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Berkah dan Karunia-Nya, dalam memberikan kekuatan sehingga sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024 dapat tersusun dan terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang ditelaah di tetapkan dengan Perjanjian Kinerja Antara Kepala SKPD dalam Hal ini Camat Bekasi Barat dengan Walikota dalam rangka mencapai tujuan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi serta menerangkan laporan Capaian keuangan dan capaian target kegiatan yang menjelaskan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung urusan program). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bekasi Barat Tahun Anggaran 2024.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat ini masih banyak kekurangannya namun demikian kami berharap dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat mencakup semua laporan realisasi anggaran dan fisik dari program serta pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bekasi Barat ditahun berikutnya.

Bekasi, Januari 2025
CAMAT BEKASI BARAT



RIDWAN AS, SH., M.Si.
NIP. 19691030 200312 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	
1.3 Aspek Strategis Organisasi	
1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	
1.5 Sistematika Penyajian	
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis	
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	
2.2 Perjanjian Kinerja	
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	
3.3 Realisasi Anggaran	
BAB IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Rencana Tindak	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80), Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006). Peraturan Walikota nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 62 Seri D). Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 49 Seri E)

Kecamatan adalah sebuah Perangkat Daerah Kota Bekasi sekaligus penyelenggara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan manajemen strategis di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan di dalam Rencana Strategis organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas suatu kinerja instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 (tiga) aspek yang merupakan suatu sinergi, yaitu :

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (*enablers*) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset (harta

kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.

2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan- tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi.
3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Bekasi Barat menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Bekasi Barat yang telah ditetapkan pada tahun 2024, untuk menyajikan Capaian Indikator Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Barat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bekasi. Sasaran yang ada RENSTRA Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Barat adalah Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat (BLPU), Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan layanan publik dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. Indikator ini sebagai indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran RENSTRA KCBB yaitu meningkatnya kinerja dan layanan publik di KCBB. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi I RPJMD Kota Bekasi 2024 –2026 yaitu meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat.

2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Barat yang kedua adalah Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang didukung oleh Kohesi sosial yang kuat. yang mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Bekasi Barat dengan capaian target sebesar 71%
3. Jika melihat capaian indikator kinerja utama Kecamatan Bekasi barat pada Tahun 2024 dimana Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 40, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan layanan publik dalam pembangunan dengan capaian 60%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dengan nilai 85,02.

Maka pada tahun 2024 Kecamatan Bekasi Barat harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang telah tercapai pada tahun 2024 maupun target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada tahun 2024. Adapun rincian kinerja yang ditingkatkan pada tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator Capaian Nilai Zona Integritas (ZI) mempunyai Nilai Target sebesar 40
2. Untuk indikator capaian nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat (BLPU) memperoleh capaian kinerja 88,07 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 62,81. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2024 adalah sebesar 40, memastikan nilai AKIP yang telah di targetkan akan tercapai.
3. Indikator Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan layanan publik dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat mencapai target 100% dari nilai yang telah ditargetkan sebesar 60.
4. Untuk indikator Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 Realisasi dari Survei adalah sebesar 85,02 dari target 82,50, dengan persentase 101.03%.
5. Indikator persentase Peningkatan Wilayah tertib di kecamatan Bekasi Barat memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen.
6. Indikator persentase penurunan jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komperhensif mengenai Kinerja Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2024 sesuai

dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 ini.

1.2 Tugas Fungsi Dan Wewenang Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Bekasi Barat dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah menimbulkan pengaruh yang cukup besar, baik secara fisik maupun non fisik di wilayah Kecamatan Bekasi Barat. hal ini terlihat pada beberapa faktor yang menentukan, diantaranya yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan pemukiman baru yang tinggi di wilayah Kecamatan menimbulkan penambahan penduduk dan berkembangnya berbagai permasalahan kependudukan;
2. Tingkat pertumbuhan fasilitas umum seperti telepon, prasarana perhubungan, listrik dan perbelanjaan semakin meningkat;
3. Tingkat kebutuhan prasarana sosial seperti prasarana peribadatan, pendidikan dan kesehatan meningkat;
4. Karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat menjadi heterogen karena memiliki keterpaduan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan.

Oleh karenanya sebagai SKPD Kecamatan Bekasi Barat akan terus berupaya memberikan pelayanan secara maksimal berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki warga masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu :

1. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial.

4. Seksi Ekonomi Pembangunan

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

5. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106°c 48'28" – 107°c 27'29" Bujur Timur dan 6°c 10'6" – 6°c 30'6" Lintang Selatan, kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0 - 3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28°c-32°c, kelembaban 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin Musim Barat dan Musim Timur.

Luas Wilayah Kecamatan Bekasi Barat adalah 1.492.680 Ha yang terdiri dari 92 RW dan 749 RT, serta lima kelurahan terdiri dari :

NO	KELURAHAN	Luas Wilayah	JUMLAH	
			RT	RW
1	Kelurahan Bintara	234.168 Ha	160	17
2	Kelurahan Bintara Jaya	520.292 Ha	119	14
3	Kelurahan Kranji	249.000 Ha	99	16
4	Kelurahan Kota Baru	328.120 Ha	179	22
5	Kelurahan Jakasampurna	161.100 Ha	192	23
Jumlah		1.492.680 Ha	749	92

Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Bekasi Barat adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede/Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

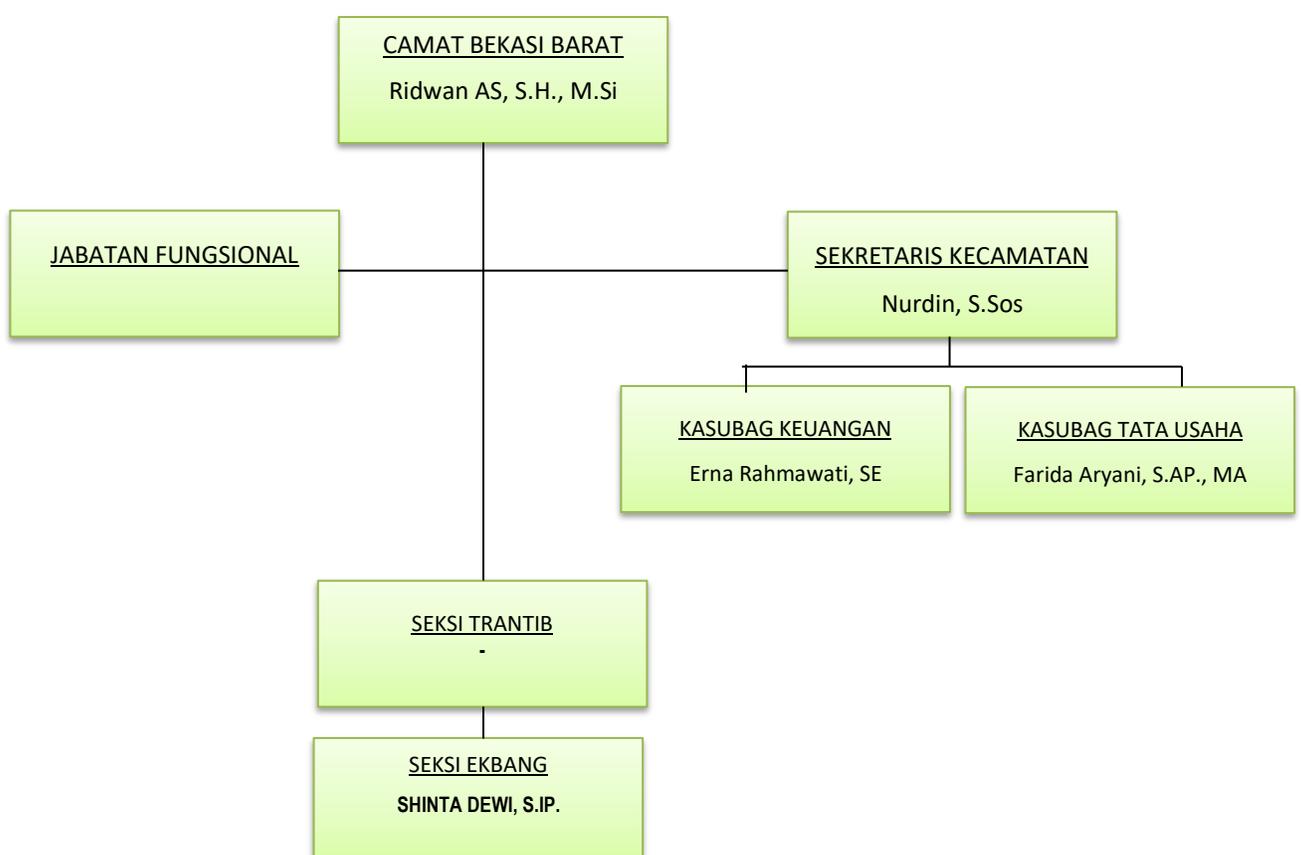
Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Kecamatan Bekasi Barat yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Kecamatan Bekasi Barat dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan tinggi Kecamatan Bekasi Barat diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas Lembaga dan unit secara lebih baik.

Pegawai Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	53	-	11	31	1	9	-	-
2	TENAGA KONTRAK	153	-	-	51	13	88	1	-
TOTAL		216	-	11	82	14	97	1	-

Sumber Tata Usaha Kecamatan Bekasi Barat November 2024

Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat sebagai berikut :





Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber Tata Usaha Kecamatan Bekasi Barat November 2024

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini direalisasikan melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program peyelenggaraan Pemerintahan dan Peayanan Publik

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini direalisasikan melalui kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini direalisasikan melalui kegiatan :

1. Koordinasi Pimpinan di KEcamatan Bekasi Barat.

Fungsi dari masing-masing Seksi yang ada di Kecamatan Bekasi Barat yaitu:

1. Seksi Pemerintahan, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan, Memfasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan, melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah dan memfasilitasi pendirian sarana/program pendidikan ke pada Perangkat Daerah.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan dan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat berkoordinasi dengan UPT terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau

Kelompok USP yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait, mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait, membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM, mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait.

5. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban, melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah, memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, melakukan Koordinasi dengan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika LKIP Kecamatan Bekasi Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaanstrategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut ;

1. Membandingkan antara target dan realisasikinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara capaian kinerja tahunini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target

- jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
4. Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Bekasi Barat didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024–2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat Bekasi Barat Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2024, dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2024 - 2026 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Bekasi Barat ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun

2024-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bekasi Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bekasi Barat dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bekasi Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bekasi Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Bekasi Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Bekasi Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Adapun tujuannya :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Persentase Capaian Nilai AKIP, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Publik dalam pembangunan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

2. Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Aman dan Nyaman.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan berdasarkan Persentase Peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Bekasi Barat.

Sedangkan Sasaran adalah Penjabaran dari Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat untuk jangka waktu 3 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Barat menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat;
2. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh

kohesi sosial yang kuat.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Barat	1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Barat	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	72	73	75
			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
		2. Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	82.5	82.5	83
		3. Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	60	60	60
		4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	60	60	60
2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	71	80	86

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi yang di emban. Untuk Kecamatan Bekasi Barat mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat (BLPU);

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Target Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat (BLPU) tahun 2024 yaitu 72 dengan realisasi capaian nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat sebesar 62,81. Dengan tingkat capaian sebesar 87,24% Kecamatan Bekasi Barat mengalami penurunan nilai AKIP, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan capaian nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat tahun 2025.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM. Target IKM Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024 sebesar 82,5%. Realisasi capaian nilai IKM Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024 sebesar 85,02%, dengan capaian sebesar 101,30%

3. Persentase Peningkatan Wilayah Tertib;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselaran antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Target Persentase Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024 sebesar 71, realisasi capaian sebesar 71 dengan persentase capaian sebesar 100%.

Tabel 2.1
DATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	REALISASI KINERJA						KET
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Wilayah tertib K-3	%	100	100	100	100	100	100	
Pemberdayaan Masyarakat									
1	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Posyandu Aktif	%	90	96	100	100	100	100	
4	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	15	18	45	45	45	45	
5	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan	Nilai	85	30	60	60	60	60	
8	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	98	98	100	99,02	99,02	85,02	

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024

Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) Program pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada Kecamatan Bekasi Barat seperti berikut :

1. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik.
2. Program Peningkatan Kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Program-program pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas

hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

- a. **Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat** dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu : Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat (BLPU), Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik.
- b. **Sasaran Strategis Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang didukung oleh Kohesi social yang kuat** dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Bekasi Barat”, Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Barat melaksanakan 1 (satu) program (**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**). Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Presentase Wilayah Tertib” Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% untuk indikator. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan).

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

NO	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat (BLPU)	%	100 %	Triwulan I	40%
					Triwulan II	40%
					Triwulan III	40%
					Triwulan IV	40%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat	%	100%	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik	Nilai	82,5	Triwulan I	82,19
					Triwulan II	83,50
					Triwulan III	80,86
					Triwulan IV	92,22

2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	%	100 %	Triwulan I	-
					Triwulan II	
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100%

Tabel 2.2.1
Alokasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7
4.11.02	Kecamatan Bekasi Barat	35.770.436.000,00	8.115.817.468,00	10.628.679.152,00	7.862.325.654,00	9.163.613.726,00
4.11.02.01	Kecamatan Bekasi Barat	23.774.111.600,00	5.558.389.468,00	6.547.145.952,00	5.335.278.854,00	6.333.297.326,00
1,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.102.762.000,00	2.734.453.318,00	3.602.337.802,00	2.721.121.704,00	3.044.849.176,00
2,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5,9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
6,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.000.000,00	233.210.000,00	6.790.000,00	0,00	0,00
6,5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	42.342.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00	1.094.000,00
6,6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
6,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000,00	20.000.000,00	37.500.000,00	30.000.000,00	47.500.000,00
6,1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.507.000,00	52.386.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00
7,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	495.956.000,00	381.657.000,00	109.000,00	0,00	114.190.000,00
8,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	644.600.000,00	121.380.000,00	121.380.000,00	121.380.000,00	280.460.000,00
8,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.270.743.600,00	1.366.217.150,00	2.294.842.150,00	1.991.967.150,00	2.617.717.150,00
9,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	19.250.000,00	20.750.000,00	19.250.000,00	20.750.000,00
9,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	19.296.000,00	61.796.000,00	37.296.000,00	31.612.000,00
9,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	25.300.000,00	48.700.000,00
9,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
23,1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	19.785.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	6.275.000,00
24,1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	85.810.000,00	7.980.000,00	23.940.000,00	29.950.000,00	23.940.000,00
26,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

26,3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.000.000,00	5.220.000,00	27.076.000,00	119.292.000,00	8.412.000,00
26,4	Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
30,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	30.000.000,00	10.610.000,00	6.510.000,00	52.880.000,00
30,2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	314.733.000,00	91.213.000,00	15.750.000,00	192.020.000,00	15.750.000,00
32,8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000,00	0,00	17.892.000,00	9.940.000,00	12.168.000,00
4.11.02.02	Kelurahan Jakasampurna	2.939.976.200,00	678.788.800,00	926.149.800,00	612.295.800,00	722.741.800,00
23,1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	27.887.000,00	7.371.000,00	7.371.000,00	7.371.000,00
26,2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
26,3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.325.976.200,00	550.036.800,00	717.823.800,00	523.969.800,00	534.145.800,00
27,1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
30,2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	324.000.000,00	80.865.000,00	80.955.000,00	80.955.000,00	81.225.000,00
4.11.02.03	Kelurahan Kotabaru	2.607.026.400,00	618.433.600,00	819.447.600,00	620.647.600,00	548.497.600,00
23,1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26,2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
26,3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.133.526.400,00	499.933.600,00	654.447.600,00	475.647.600,00	503.497.600,00
27,1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
30,2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	193.500.000,00	58.500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
4.11.02.04	Kelurahan Kranji	1.939.134.000,00	312.086.000,00	820.356.000,00	316.006.000,00	490.686.000,00
23,1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	45.000.000,00	32.400.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
26,2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00
26,3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.504.134.000,00	222.186.000,00	600.256.000,00	228.506.000,00	453.186.000,00
27,1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
30,2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	150.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
4.11.02.05	Kelurahan Bintara	2.425.751.800,00	534.919.800,00	779.675.400,00	463.583.800,00	647.572.800,00
23,1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	3.000,00	19.997.000,00	0,00	0,00
26,2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
26,3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.931.751.800,00	463.916.800,00	588.667.400,00	312.583.800,00	566.583.800,00
27,1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
30,2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	234.000.000,00	51.000.000,00	51.011.000,00	51.000.000,00	80.989.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

4.11.02.06	Kelurahan Bintarajaya	2.084.436.000,00	413.199.800,00	735.904.400,00	514.513.600,00	420.818.200,00
23,1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
26,2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
26,3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.634.436.000,00	352.699.800,00	534.404.400,00	371.013.600,00	376.318.200,00
27,1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
30,2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	170.000.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00
TOTAL		35.770.436.000,00	8.115.817.468,00	10.628.679.152,00	7.862.325.654,00	9.163.613.726,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Bekasi Barat selaku pengemban amanah masyarakat kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bekasi Barat yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor.239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP).

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran Kecamatan .

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 4. Evaluasi capaian hasil indikator sasaran Tahun pada Renstra Tahun 2024-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti dalam Tabel 3.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Indikator Sasaran yang dilaksanakan pada Renja Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian kinerja sasaran Tahun 2024

No	SasaranStrategis	Indikator Tujuan dan Capaian Nilai Zona Integritas Utama	Satuan	2024			
				Target	Capaian	Tingkat Capaian %	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat (BLPU)	Nilai	72	62,81	87.24%	Tidak Tercapai
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat	%	60	60	100%	Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	82,5	85,02	103.05%	Melebihi Target
2	Terwujudnya Ketertiban, dan Ketentraman masyarakat yang di dukung oleh Kohesi sosial yang kuat.	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	%	71	71	100%	Tercapai

Sumber data : Kasubag Tata Usaha Kec. Bekasi Barat

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024-2026. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

Pertama Persentase Nilai AKIP di Kecamatan Bekasi Barat dengan capaian kinerja sebesar 89,72 persen, kedua Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, dan yang ketiga Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik dengan Nilai 103.05 untuk itu diharapkan untuk lebih meningkat dan sesuai dengan target pada tahun 2024.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi bersinergi dengan masyarakat dan stakeholder yang ada dengan menetapkan indikator yaitu Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Barat dengan capaian kinerja 100 persen (tercapai) dapat diinterpretasikan sasaran Kecamatan Bekasi Barat agar indikator ini tercapai.

Dengan melihat 4 indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Kecamatan Bekasi Barat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat yang diukur dengan indikator capaian nilai AKIP yang tercapai yaitu sebesar 82,61 dari target yang telah ditetapkan sebesar 72 dengan capaian kinerja 87.24 persen.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.2.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat, Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kecamatan Bekasi Barat sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui Perwal Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan. Hal tersebut menyebabkan adanya kaitan erat antara Kecamatan Bekasi Barat dengan Dinas/UPTD teknis yang menjadi penanggungjawab urusan. Kinerja dan layanan di Kecamatan Bekasi Barat dapat meningkat sejalan dengan pencapaian AKIP yang menjadi urusan Dinas teknis terkait tersebut. Sehingga Kecamatan Bekasi Barat memiliki peran penting dalam peningkatan AKIP yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Barat.

A. Capaian Target dengan Realisasi Tahun ini

Capaian target dengan Realisasi adalah perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Capaian kinerja indikator Persentase Capaian AKIP di Kecamatan Bekasi Barat dapat dilihat dari Pencapaian indikator kinerja sasaran nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Nilai AKIP 2024 di Kecamatan Bekasi Barat

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2024		Ket
		Bobot	Nilai	
1	Perencanaan Kinerja	30	18,73	
2	Pengukuran Kinerja	30	18,55	
3	Pelaporan Kinerja	15	10,36	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	15,17	
Nilai Hasil evaluasi		100	62,81	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	

Sumber LHR Sakip Kec. Bekasi Barat Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa bobot Nilai Hasil Evaluasi sebesar 63,41 dari target 72 sehingga tidak memenuhi target, dengan pencapaian 87.24 Persen

B. Perbandingan Capaian Tahun ini dengan tahun lalu.

Evaluasi Nilai AKIP dapat memberikan kesimpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dapat menunjukkan tingkat perbaikan kinerja Kecamatan Bekasi Barat

Tabel 3.3

**Perbandingan Pencapaian Indikator Nilai Akip di
Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 dan 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	Nilai	70	63.41	90.58%	72	62,81	87.24%

Sumber : Hasil LHR APIP Tahun 2023 dan 2024

Capaian Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang Akuntabilitas kinerja di Kecamatan Bekasi Barat, Kurangnya system perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang terpadu, untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman SDM dibidang Akuntabilitas kinerja di perlukan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta pemanbahan personil yang berkompeten.

C. Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4

Perbandingan Pencapaian Indikator AKIP dengan Target Jangka Menengah/ Renstras 2024-2026

Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	Satuan	Target Restra 2024-2026
Target	Nilai	72
Realisasi	Nilai	62.81

Sumber : Data Kasubag Tata Usaha Kecamatan Bekasi Barat

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai Capaian Akip yang tercapai di Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2024 sebesar 87.24% maka Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Bekasi Barat untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian Kinerja.

D. Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Daerah Sekitar

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator AKIP dengan Perangkat Daerah Lain

No	Perangkat Daerah	Nilai
1	Bekasi Barat	62.81
2	Bekasi Selatan	75.16
3	Bekasi Utara	72.74
4	Bekasi Timur	76.55
5	Medan Satria	78.90
6	Mustikajaya	74.85
7	Rawalumbu	77.90
8	Bantargebang	74.78
9	Jatisampurna	75.57
10	Jatiasih	60.23
11	Pondok Melati	75.14
12	Pondokgede	77.14

E. Hasil Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan se-Kota Bekasi, menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Barat dengan nilai 62,81 dengan predikat 'B', hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja 'Baik' yaitu sudah Baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

F. Hasil Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat efisiensi
		RP	%		
Kecamatan Bekasi Barat	35.770.436.000	34.181.662.703	95,56 %	100%	4.44%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.853.568.600	21.461.465.028	93,91%	100%	6.09%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100%	100%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100%	100%	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.112.762.000	11.469.390.297	94,69%	100%	5.31%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.102.762.000	11.460.790.297	94,70	100%	5.3%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	8.600.000	86,00	100%	14%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	-	-	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	-	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.507.000	500.993.200	96,44	100%	3.56%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	17.603.400	88,02	100%	11.98%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.000.000	236.612.800	98,59	100%	1.41%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	49.895.000	99,79	100%	0.21%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	14.250.000	71,25	100%	28.75%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	129.812.000	96,16	100%	3.84%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.507.000	52.820.000	96,90	100%	3.1%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.956.000	488.141.000	98,42	100%	1.58%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	495.956.000	488.141.000	98,42	100%	1.58%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.915.343.600	8.357.738.768	93,75	100%	6.25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	644.600.000	442.923.091	68,71	100%	31.29%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.270.743.600	7.914.815.677	95,70	100%	4.3%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.000.000	635.201.763	80,41	100%	19.59%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	64.601.363	80,75	100%	19.25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	119.765.700	79,84	100%	20.16%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	104.825.000	95,30	100%	6.7%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.000.000	346.009.700	76,89	100%	23.11%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	135.810.000	119.309.500	87.85	100%	12.15%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	50.000.000	44.649.500	89.30	100%	10.7%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	44.649.500	89.30	100%	10.7%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.810.000	74.660.000	87.01	100%	12.99%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	85.810.000	74.660.000	87.01	100%	12.99%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	330.000.000	296.885.700	89.97	100%	10.03%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	330.000.000	296.885.700	89.97	100%	10.03%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	115.751.500	96.46	100%	3.54%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.000.000	156.384.200	97.74	100%	2.26%
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	24.750.000	49.50	100%	50.5%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	414.733.000	374.689.000	90.34	100%	9.66%

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	414.733.000	374.689.000	90,34	100%	9,66%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000	68.790.000	68,79	100%	31,21%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	314.733.000	305.899.000	97,19	100%	2,81%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	38.936.000	97,34	100%	2,66%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000	38.936.000	97,34	100%	2,66%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000	38.936.000	97,34	100%	2,66%
Kelurahan Jakasampurna	2.939.976.200	2.924.769.800	99,48	100%	0,52%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.000.000	41.927.000	83,85	100%	16,75%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	50.000.000	41.927.000	83,85	100%	16,15%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	41.927.000	83,85	100%	16,15%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.565.976.200	2.559.862.800	99,76	100%	0,24%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.565.976.200	2.559.862.800	99,76	100%	0,24%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100	100%	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.325.976.200	2.319.862.800	99,74	100%	0,26%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	324.000.000	322.980.000	99,69	100%	0,31%

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	324.000.000	322.980.000	99,69	100%	0.31%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	324.000.000	322.980.000	99,69	100%	0.31%
Kelurahan Kotabaru	2.607.026.400	2.581.408.900	99,02	100%	0.98%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.000.000	37.024.000	92,56	100%	7.44%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	40.000.000	37.024.000	92,5	100%	7.5%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	37.024.000	92,56	100%	7.44%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.373.526.400	2.351.465.400	99,07	100%	0.93%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.333.526.400	2.311.465.400	99,05	100%	0.95%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100	100%	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.133.526.400	2.111.465.400	98,97	100%	1.03%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	193.500.000	192.919.500	99,70	100%	0.3%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	193.500.000	192.919.500	99,70	100%	0.3%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	193.500.000	192.919.500	99,70	100%	0.3%
Kelurahan Kranji	1.939.134.000	1.931.710.150	99,62	100%	0.38%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.000.000	43.728.550	97,17	100%	2.83%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000	43.728.550	97,17	100%	2.83
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	5.000.000	43.728.550	97,17	100%	2.83%

terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.744.134.000	1.737.981.600	99,65	100%	0.35%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.744.134.000	1.737.981.600	99,65	100%	0.35%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100	100%	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.504.134.000	1.497.981.600	99,59	100%	0.41%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-	
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	150.000.000	150.000.000	100	100%	-	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	150.000.000	100	100%	-	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	150.000.000	100	100%	-	
Kelurahan Bintara	2.425.751.800	2.412.324.800	99,45	100%	0.55%	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	18.499.000	92,50	100%	7.5%	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000	18.499.000	92,50	100%	7.5%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	18.499.000	92,50	100%	7.5%	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.171.751.800	2.161.013.800	99,51	100%	0.49%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.131.751.800	2.121.013.800	99,50	100%	0.5%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100	100%	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.931.751.800	1.921.013.800	99,44	100%	0.56%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-	
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	234.000.000	232.812.000	99,49	100%	0.51%	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	234.000.000	232.812.000	99,49	100%	0.51%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	234.000.000	232.812.000	99,49	100%	0.51%
Kelurahan Bintarajaya	2.084.436.000	2.040.163.825	97,88	100%	2.12%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.000.000	20.880.000	52,20	100%	47.8%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	40.000.000	20.880.000	52,20	100%	47.8%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	20.880.000	52,20	100%	47.8%
Kelurahan Bintarajaya	2.084.436.000	2.040.163.825	97,88	100%	2.12%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.000.000	20.880.000	52,20	100%	47.8%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	40.000.000	20.880.000	52,20	100%	47.8%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	20.880.000	52,20	100%	47.8%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.874.436.000	1.862.383.825	99,36	100%	0.64%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.874.436.000	1.862.383.825	99,36	100%	0.64%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100	100%	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.634.436.000	1.622.383.825	99,26	100%	0.74%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100	100%	-
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	170.000.000	156.900.000	92,29	100%	7.71
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	170.000.000	156.900.000	92,29	100%	7.71%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	170.000.000	156.900.000	92,29	100%	7.71%

TOTAL	35.770.436.000	34.181.662.703	95,56	100%	4.44%
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------------	--------------

3.2.2 SASARAN PERTAMA : Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan,

A. Capaian Target dengan Realisasi Tahun ini

Capaian Target dengan realisasi di tahun 2024 menunjukkan kenaikan, hal tersebut di dapat setelah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Sisukma, Adapun capaian dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 3.7
Pencapaian indikator kinerja sasaran
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Target	Realisasai
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	85.02

Sumber Hasil Survei SMT 1 dan SMT 2 Kec Bekasi Barat

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi yang di dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 82.5 mempunyai realisasi 85.02, jadi sudah memenuhi target bahkan melebihi sebesar 103.05 persen.

B. Perbandingan Capaian Tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.8
Pencapaian indikator kinerja sasaran
Indeks Kepuasan Masyarat

no	Indikator	satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	82.5	84.48	102.4%	82,5	85.02	103.05%

Sumber data : Kasubag TU Kec Bekasi Barat

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Tahun lalu yang mendapatkan nilai sebesar 84.48, tahun 2024 mendapatkan peningkatan nilai dengan nilai sebesar 85.02 jadi perolehan peningkatan poin sebesar 0.54 Point dari tahun kemarin.

C. Perbandingan Capaian Tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.9

Pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat	Satuan	Target Renstra 2024-2026
Target	Nilai	82,5
Realisasi	Nilai	85.02

Sumber Kasubag TU Kec Bekasi Barat

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi yang di dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 82.5 mempunyai realisasi 85.02, jadi sudah memenuhi target bahkan melebihi sebesar 103.05 persen.

D. Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Daerah sekitar

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian denan Kecamatan lain se Kota Bekasi

No	Kecamatan	Nilai
1	Bekasi Barat	85.02
2	Bekasi Selatan	82.10
3	Bekasi Utara	84.30
4	Bekasi Timur	86.85
5	Medan Satria	84.85
6	Mustikajaya	88.79
7	Rawalumbu	83.20
8	Bantargebang	81.18
9	Jatisampurna	88.22
10	Jatiasih	90.14
11	Pondok Melati	84.94
12	Pondokgede	85.53

Sumber : Kasubag Tata Usaha Kecamatan Bekasi Barat

Dari Tabel diatas menerangkan bahwa Pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat Mendapatkan Predikat Baik. Dan perlu ditingkat lagi sehingga diharapkan dapat mendapat predikat sangat baik kedepannya.

E. Hasil Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan yg dinilai, 3 (tiga) unsur yang memiliki nilai rata-rata tertinggi meliputi :

1. Dengan kekuatan Pelayanan Prima Tidak menyulitkan, prosedur/tata cara pelayanan secara mudah, tidak berbelit-belit, mudah difahami dan mudah dilaksanakan oleh penerima pelayanan
2. Dengan kekuatan adanya Kanal pengaduan melalui Span Lapor. IG, dan Web Kecamatan.
3. Petugas Pelayanan yang memiliki Kompetensi, dan perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku

Sedangkan 3 (tiga) unsur yang memiliki nilai rata-rata terendah meliputi :

1. Dengan kelemahan Masih belum tingginya sikap atau perilaku Sumberdaya Aparatur yang langsung berhadapan dengan Stakeholder. masih adanya perilaku yang tidak menerapkan Salam, Senyum dan Sapa sehingga terkesan Judes. dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa diperlukan Perbaikan dengan Capacity Building bagi Petugas Pelayanan. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya Mempunyai anggaran pembiayaan.
2. image dan citra pelayanan publik selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa adanya Sosialisasi Standar Pelayanan kepada Stakeholder (RT/RW/Masyarakat penerima Pelayanan), sehingga masyarakat dapat mengetahui kepastian waktu pelayanan yang dimohon.
3. Sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku. Masih ada Petugas/ Aparatur yang bersikap Judes. dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku. dan Publik Speaking bagaimana cara menghadapi penerima pelayanan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Tabel 3.6

Alokasi dan Realisasi Anggaran Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Capaian Nilai Akip di Kecamatan Bekasi Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI				
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	6				
	UNSUR KEWILAYAHAN		82.5	35,328,186,000	82.5	35,770,436,000	442,250,000					
	KECAMATAN BEKASI BARAT			23,494,111,600		23,774,111,600	280,000,000					
7	1	1										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	22,479,378,600	100%	22,853,568,600	374,190,000					
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%							
7	7	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10,000,000	100%	10,000,000	-	
	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
					Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		100%			
7	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,112,762,000	100%	12,112,762,000	-	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1560 Orang/ bulan	12,102,762,000	1560 Orang/ bulan	12,102,762,000	-	Kecamatan Bekasi Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	1	2.02	5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		100%			
7	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10,000,000	100%	10,000,000	-	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	0	-	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10,000,000	2 Orang	10,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%		100%			
7	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	499,507,000	100%	519,507,000	20,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	240,000,000	5 Paket	240,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	115,000,000	12 Laporan	135,000,000	20,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	1	2.06	10	15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	54,507,000	12 Dokumen	54,507,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8,675,343,600	100%	8,915,343,600	240,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	404,600,000	12 Laporan	644,600,000	240,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8,270,743,600	12 Laporan	8,270,743,600	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	381,766,000	100%	495,956,000	114,190,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	381,766,000	19 Unit	495,956,000	114,190,000	Kecamatan Bekasi Barat
7	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	790,000,000	100%	790,000,000	-	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	80,000,000	2 Unit	80,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	150,000,000	35 Unit	150,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	450,000,000	6 Unit	450,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87 Unit	110,000,000	87 Unit	110,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	250,000,000	100%	135,810,000	- 114,190,000	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	50,000,000	100%	50,000,000	-	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	200,000,000	100%	85,810,000	- 114,190,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Uraan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	200,000,000	12 Dokumen	85,810,000	- 114,190,000	Kecamatan Bekasi Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	6
	dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
7	1	3						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%	330,000,000	100%	330,000,000	-	
7	1	3	2.02					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	330,000,000	100%	330,000,000	-	
7	1	3	2.01	1				
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Masyarakat	120,000,000	5 Lembaga Masyarakat	120,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	3	2.02	3				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	160,000,000	11 Pokmas / Ormas	160,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	3	2.02	4				
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1	5						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	100%	394,733,000	100%	414,733,000	20,000,000	
		2. Persentase wilayah tertib K3	100%		100%			
7	1	5	2.01					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	394,733,000	100%	414,733,000	20,000,000	
7	1	4	2.01	8				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Kegiatan penertiban dan keamanan di Kecamatan Bekasi Barat	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	100,000,000	20,000,000	Kecamatan Bekasi Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI	
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	6	
	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7	1 4 2.01 9	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	314,733,000	12 Laporan	314,733,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
7	1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Bekasi Barat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1 5 2.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas orum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	-	Kecamatan Bekasi Barat
UNSUR KEWILAYAHAN					2,395,751,800		2,425,751,800	30,000,000	
KELURAHAN BINTARA					2,395,751,800		2,425,751,800	30,000,000	
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	20,000,000	100%	20,000,000	-	
7	1 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	20,000,000	100%	20,000,000	-	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintara	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	-	Kelurahan Bintara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%	2,141,751,800	100%	2,171,751,800	30,000,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapaiannya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	2,101,751,800	100%	2,131,751,800	30,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	508 Pokmas / Ormas	1,901,751,800	508 Pokmas / Ormas	1,931,751,800	30,000,000	Kelurahan Bintara
7	1	3	2.02	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	-	Kelurahan Bintara
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tercapaiannya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Bintara	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan Kelurahan Bintara	2 Lembaga Masyarakat	40,000,000	2 Lembaga Masyarakat	40,000,000	-	Kelurahan Bintara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	100%	234,000,000	100%	234,000,000	-	
						2. Persentase wilayah tertib K3					-	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	234,000,000	100%	234,000,000	-	
7	1	4	2.01	9	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	234,000,000	12 Laporan	234,000,000	-	Kelurahan Bintara
UNSUR KEWILAYAHAN								2,054,436,000		2,084,436,000	30,000,000	
KELURAHAN BINTARA JAYA								2,054,436,000		2,084,436,000	30,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	40,000,000	100%	40,000,000		
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	-	Kelurahan Bintarajaya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%	1,844,436,000	100%	1,874,436,000	30,000,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	1,804,436,000	100%	1,834,436,000	30,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	494 Pokmas / Ormas	1,604,436,000	494 Pokmas / Ormas	1,634,436,000	30,000,000	Kelurahan Bintarajaya
7	1	3	2.02	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000		Kelurahan Bintarajaya
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan Kelurahan Bintara	2 Lembaga	40,000,000	2 Lembaga	40,000,000	-	Kelurahan Bintarajaya
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	100%	170,000,000	100%	170,000,000	-	
						2. Persentase wilayah tertib K3	100%		100%		-	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	170,000,000	100%	170,000,000	-	
7	1	4	2.01	9	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	170,000,000	12 Laporan	170,000,000	-	Kelurahan Bintarajaya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	3	2.02	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	-	Kelurahan Kranji
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kranji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bintara	2 Lembaga	40,000,000	2 Lembaga	40,000,000	-	Kelurahan Kranji
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	100%	150,000,000	100%	150,000,000	-	
						2. Persentase wilayah tertib K3	100%		100%		-	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	150,000,000	100%	150,000,000	-	
7	1	4	2.01	9	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kranji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12Laporan	150,000,000	12Laporan	150,000,000	-	Kelurahan Kranji
					UNSUR KEWILAYAHAN			2,576,776,400		2,607,026,400	30,250,000	
					KELURAHAN KOTA BARU			2,576,776,400		2,607,026,400	30,250,000	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI	
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2				3	4	5	6	7	8	6	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kotabaru	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	-	Kelurahan Kotabaru
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	2,343,276,400	100%	2,373,526,400	30,250,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	2,303,276,400	100%	2,333,526,400	30,250,000	
7	1	3	2.02	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	2,103,276,400	9 Pokmas / Ormas	2,133,526,400	30,250,000	Kelurahan Kotabaru
7	1	3	2.02	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	-	Kelurahan Kotabaru
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotabaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bintara	2 Lembaga	40,000,000	2 Lembaga	40,000,000		Kelurahan Kotabaru

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	100%	193,500,000	100%	193,500,000	-	
						2. Persentase wilayah tertib K3	100%		100%			
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	193,500,000	100%	193,500,000	-	
7	1	4	2.01	9	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	193,500,000	12 Laporan	193,500,000	-	Kelurahan Kotabaru
UNSUR KEWILAYAHAN								2,909,976,200		2,939,976,200	30,000,000	
KELURAHAN JAKASAMPURNA								2,909,976,200		2,939,976,200	30,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	50,000,000	100%	50,000,000	-	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	50,000,000	100%	50,000,000	-	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	-	Kelurahan Jakasampurna

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
					dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasampurna	Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100%	2,535,976,200	100%	2,565,976,200	30,000,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	2,495,976,200	100%	2,525,976,200	30,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	652 Pokmas/Ormas	2,295,976,200	652 Pokmas/Ormas	2,325,976,200	30,000,000	Kelurahan Jakasampurna
7	1	3	2.02	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000		Kelurahan Jakasampurna
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan Kelurahan Bintara	2 Lembaga	40,000,000	2 Lembaga	40,000,000	-	Kelurahan Jakasampurna
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	100%	324,000,000	100%	324,000,000	-	
						2. Persentase wilayah tertib K3	100%		100%			
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	324,000,000	100%	324,000,000	-	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SELISIH	LOKASI
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	6
7	1	4	2.01	9	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12Laporan	324,000,000	12Laporan	324,000,000	-	Kelurahan Jakasampurna

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Akip di Kecamatan Bekasi Barat antara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian Nilai Akip di Kecamatan Bekasi Barat

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	REALISASI
1	Persentase Capaian Nilai Akip yang mencapai target sasaran di Kecamatan Bekasi Barat	Nilai	62,81	89.73 %

Indikator kinerja sasaran Capaian Nilai Akip di Kecamatan Bekasi Barat merupakan indikator baru pada Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026, sehingga tidak dapat disajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Indikator kinerja sasaran Capaian Nilai Akip di Kecamatan Bekasi Barat dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik pada Kecamatan Bekasi Barat.

1. Indikator Sasaran peningkatan pemberdayaan masyarakat dan layanan publik dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat.

Keberhasilan Indikator Sasaran ini dilihat dari partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, program peningkatan pelayanan masyarakat di Kecamatan.

2. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 6 (Enam) jenis layanan pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama IKM

	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	82,5	85,02	101,30%

Sumber: SKM Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun Desember 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target IKM Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2024 sebesar 82,5 poin, sementara realisasi mencapai 85,02 poin, maka capaian kinerja tahun 2024 atas telah mencapai target yang telah ditetapkan dan pencapaian yang di dapat adalah sebesar 101,30 persen, maka untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 harus lebih ditingkatkan lagi.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 terhadap 7 jenis layanan publik di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat. Untuk melihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,600	3,800	3,600	3,700	3,700	3,700	3,600	3,700	3,800
Mutu Kinerja	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Prioritas peningkatan kualitas pelayanan	1	9	2	4	5	6	3	7	8

Skor KM Total :		92.22			Sangat Baik
Mutu Pelayanan :					
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	

Sumber : Data hasil SKM Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024, diolah

Adapun faktor penyebab belum tercapainya target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi survey. Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Bekasi Barat, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Kemasyarakatan, Penyelenggaran Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.10

Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama IKM

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	nilai	82,5	85,02	101,30 %

Sumber: *Evaluasi Internal Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah*

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator sasaran IndeksKepuasan Masyarakat tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM Target Akhir Renstra 2021-2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM			
		2021	2022	2023	2024
Target	Nilai	82	82,5	83	82,5
Capaian	Nilai	82.5	82,19	84,48	85,02

Sumber: *Evaluasi Internal Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah*

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator IKM pada tahun 2024 sebesar 85,02 poin dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 sebesar 83 poin, maka Kecamatan Bekasi Barat dapat mencapaian kinerjanya ke depan. Kedepannya harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Bekasi Barat untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Melakukan peremajaan sarana prasarana penunjang pelayanan agar lebih nyaman;
- c. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dandilakukan revisi jika diperlukan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat).

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Ketertiban, dan Ketentraman masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang kuat di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat

1. Indikator Sasaran Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Barat.

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan, daerah berperan dalam menyusun sistem tersebut. Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dan seiring dengan itu maka Kota Bekasi memerlukan penataan kota dimana salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Bekasi Barat sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Negara RepublikIndonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Untuk kriteria wilayah K3 berpedoman pada Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda tersebut dijadikan dasar bagi Kecamatan Bekasi Barat dalam menentukan rencana Zona K3 selama 5 tahun periode Renstra. Terdapat 14 titik yang akan dijadikan zona K3 dengan pembagian target setiap tahunnya. Zona K3 tersebut ditetapkan dalam Keputusan Camat Bekasi Barat Nomor 100/6-KC.PG/I/2019 tentang Zona Tertib K3

di Kecamatan Bekasi Barat Periode Renstra 2024-2026. Berdasarkan penetapan zona tersebut, pada tahun 2021 dilakukan penilaian terhadap 6 titik yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh tim penilai berdasarkan Keputusan Camat Bekasi Barat Nomor 100/7-KC.PG/I/2019 tentang Tim Penilai Zona Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Barat Periode Renstra 2024-2026. Hasil penilaian tim penilai sebagai berikut :

Tabel 3.15

Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib K3

No	Zona	Kategori
1	Kantor Kecamatan Bekasi Barat	Tertib K3
2	Kantor Kelurahan Bintara	Tertib K3
3	Kantor Kelurahan Bintarajaya	Tertib K3
4	Kantor Kelurahan Jakasampurna	Tertib K3
5	Kantor Kelurahan Kranji	Tertib K3
6	Kantor Kelurahan Kotabaru	Tertib K3

Sumber : Tim penilai zona K3 Kecamatan Bekasi Barat

Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat 6 zona yang telah tertib K3. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Barat dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 3.16

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Barat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Zonasi yang Tertib,	persen	86	81,39	94,64%

Sumber: Laporan hasil penilaian zona K3 Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 86 Persen, sementara realisasi mencapai 81,39 Persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Persentase Zonasi yang Tertib di Kecamatan Bekasi Barat sebesar 94,64 persen, maka capaian Persentase Zonasi yang Tertib di Kecamatan Bekasi Barat pada Tahun 2024 telah tercapai. Dengan demikian pada tahun 2024 sebanyak 6 zona di Kecamatan Bekasi Barat telah tertib.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian Indikator Sasaran Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Barat di Kecamatan Bekasi Barat ini yaitu :

1. Sepanjang tahun 2024, Kecamatan Bekasi Barat melakukan giat bersih lingkungan di wilayah. Namun, dalam sebulan terdapat jadwal yang difokuskan untuk membersihkan dan menertibkan lingkungan Kantor. Perwujudan keberhasilan Kecamatan Bekasi Barat dalam mewujudkan K3 dimulai dari wilayah yang sangat internal yaitu kantor. Selain itu, sejalan dengan pengurusan administrasi kependudukan yang saat ini dapat dilakukan di kecamatan, maka faktor kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor juga dapat mendorong kenaikan kepuasan masyarakat.
2. Menjaga lingkungan agar tetap tertib dan aman juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sinergitas 3 pilar dengan Polsek dan Koramil Bekasi Kota serta Satpol PP dilakukan mengingat dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keamanan juga dapat dilakukan karena adanya sinergitas. Selain itu, terdapat wadah pengaduan yang bersinergi dengan 3 pilar dan Satpol PP juga memudahkan penindakan secara cepat. Penertiban di kantor kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupun sekitar.

**DATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BEKASI SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017**

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA (TAHUN)						REALISASI KINERJA (TAHUN)						PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN	KOMPONEN DATA	RUMUS PERHITUNGAN	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1	Persentase Wilayah Tertib K3	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94,64	Kecamatan	Permendagri No.86 Tahun 2017	1. Wilayah Tertib K3 2. Wilayah Tertib K3 seharusnya	
2	Persentase LPM Aktif	%	81	100	100	100	100	100	81	100	100	100	100	100	100	Kecamatan	Permendagri No.86 Tahun 2017	1. LPM aktif 2. Jumlah seluruh LPM	Jumlah LPM aktif/Jumlah seluruh LPM x 100%
3	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan	Permendagri No.86 Tahun 2017	1. PKK aktif 2. Jumlah seluruh PKK	Jumlah PKK aktif/Jumlah seluruh PKK x 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

4	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	85	90	96	100	100	100	Kecamatan	Permendagri No.86 Tahun 2017	1. Posyandu aktif 2. Total Posyandu	Jumlah Posyandu aktif/Total Posyandu x 100%
5	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	45	15	18	45	45	45	45	15	18	45	45	45	Kecamatan	Permendagri No.86 Tahun 2017	1. Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat 2. Total Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat/Total Program Pemberdayaan Masyarakat x 100%
6	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	90	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	Kecamatan	Permendagri No.86 Tahun 2017	1. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan 2. total masyarakat	Jumlah keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan /Total masyarakat x 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

7	Persentase Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan	RPJMD Kota Bekasi 2018-2023	1. Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui 2. total Monografi Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui/Total Monografi Kelurahan dan Kecamatan x 100%
8	Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan	Nilai	63	85	30	60	60	60	63	85	30	60	60	60	Kecamatan	RPJMD Kota Bekasi 2018-2023	1. Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan tahun ini 2. Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan tahun sebelumnya	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan tahun ini/Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan tahun sebelumnya x 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2024

9	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	103	98	98	100	99,02	101,78	Kecamatan	RPJMD Kota Bekasi 2018-2023	1. Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat 2. Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat yg seharusnya	Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat/Nilai Kepuasan
---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-------	--------	-----------	-----------------------------	--	---

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bekasi Barat atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bekasi Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 ini Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan adabeberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2024 adalah tahun pertama periode Renstra 2014-2023. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Kecamatan Bekasi Barat merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Bekasi Barat agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Bekasi Barat agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi

pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

Bekasi, Februari 2025

CAMAT BEKASI BARAT



RIDWAN AS, SH., M.Si.
NIP. 19691030 200312 1 005

